

## MEMAHAMI MOTIVASI INVESTOR DALAM BERINVESTASI PADA BADAN USAHA MILIK DESA

Eka Siskawati<sup>1)</sup>, Zahara<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang, Padang

### ABSTRACT

This study aims to understand the motivation of investors in investing and how they behave in making decisions to invest in village-owned enterprises. The research method used was qualitative. Data were collected through in-depth interviews and direct observation of informants from the village administration. The research finding was that personal investment made by investors from village governments was motivated by reasons of power and policy. The conclusion of the study is the motivation of the investment is driven by social benefit and individual benefit. Social benefits are found from several enterprises activities that can reduce social problems in the community. The impact of this study is reducing unproductive land and the issue of damages of the environment.

**Keywords:** *Social benefit, individual benefit, social enterprise, social investment, village-owned enterprise*

### 1. PENDAHULUAN

Investasi sosial bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat bertahan dari persaingan pasar [1]. Investasi ini berfokus pada peningkatan sumber daya manusia, keterampilan dan kreativitas, dan kemandirian melalui pekerjaan, yang semuanya adalah kunci untuk mencapai kemakmuran ekonomi [2]. Investasi sosial dapat dikatakan sebagai sebuah investasi yang bersifat kontribusi sosial [3] karena belum dapat memberikan pengembalian keuangan kepada investor. Ada beberapa jenis kelompok tentang investasi sosial. Kelompok pertama disebut sebagai donatur, di mana mereka memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sosial dan tidak mengharapkan manfaat finansial.

Investasi sosial untuk kewirausahaan sosial, dalam pembangunan nasional berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan sosial ekonomi. Investasi sosial menjembatani masalah ekonomi melalui pemberdayaan komunitas yang memberikan manfaat sosial [4], sehingga model investasi sosial semakin terlibat sebagai pendorong utama [5] dalam mengatasi masalah yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan [6]. Fokus kewirausahaan sosial tidak secara eksklusif bertujuan untuk keuntungan tetapi juga berdampak pada peningkatan kemampuan individu untuk bertahan melawan persaingan ekonomi dengan memberikan layanan yang berguna bagi orang lain [7]. Tujuan seorang investor sosial adalah untuk menciptakan nilai sosial, dan ekonomi lokal tumbuh [8], yang berbeda dengan tujuan bisnis konvensional yang berfokus pada kemakmuran pemegang saham.

Dengan demikian, manfaat dari model kewirausahaan sosial dapat dinikmati oleh masyarakat luas [9], daripada keuntungan bisnis yang hanya dinikmati oleh kelompok tertentu [10]. Kelompok kedua adalah investor visioner atau oportunistik, di mana mereka berinvestasi untuk memecahkan masalah sosial dan memiliki harapan bahwa perubahan sosial positif yang mereka kejar dapat memberikan manfaat ekonomi [11]. Investasi sosial, dalam konteks kekuasaan dan tata kelola [12], relatif cenderung bertujuan untuk pembangunan manusia. Oleh karena itu, investasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan meningkatkan permodalan masyarakat. Keberhasilan investasi sosial mengutamakan kinerja manfaat sosial, seperti peningkatan bisnis masyarakat sebagai penyangga stabilitas ekonomi, peningkatan partisipasi masyarakat dan kualitas dalam pembangunan ekonomi, peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor produktif di masyarakat. Peningkatan manfaat finansial akan menyertai peningkatan manfaat sosial yang baik. Meskipun manfaat sosial adalah dampak utama yang diperoleh dari investasi sosial pada tahap awal, namun investor masih mengharapkan pengembalian finansial pada jangka panjangnya.

Badan usaha milik desa didirikan berdasarkan undang-undang desa, untuk mendorong dan mempercepat pembangunan desa [13]. Badan usaha milik desa diharapkan dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Bagi investor rasional, kewirausahaan sosial (*social enterprise*) tidak semenarik seperti investasi konvensional [14]. Kewirausahaan sosial, yang berupaya mencapai kemakmuran ekonomi dengan memberikan manfaat sosial, merupakan tempat yang sangat berisiko bagi investor

<sup>1</sup> Korespondensi penulis: Eka Siskawati, Telp 08126759903, ekasiskawati@gmail.com

konvensional. Saat ini, badan usaha milik desa sangat diharapkan dapat menjadi pilar pembangunan nasional yang digerakkan oleh masyarakat pedesaan. Upaya serius diperlukan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pengelolaan badan usaha milik desa yang efektif, efisien, profesional, dan mandiri [15].

Badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai usaha rintisan tidak dapat berjalan secara mandiri jika hanya mengandalkan dana dari pemerintah desa. Peningkatan agresif membutuhkan motivasi, dan kepemimpinan yang kuat dengan memaksimalkan komponen intrinsik dan ekstrinsik masyarakat [16]. Oleh karena itu, badan usaha milik desa membutuhkan investasi dari masyarakat untuk memenuhi modal operasional. Oleh karena itu, badan usaha milik desa tidak dapat diizinkan beroperasi tanpa partisipasi investor yang menyediakan dana pendamping. Sementara itu, investor melihat badan usaha milik desa sebagai investasi berisiko tinggi. Kontradiksi antara kebutuhan BUMDes (BUMNag) akan investor dengan investasi pada BUMNag yang kurang menarik dalam sudut pandang investor, maka hal ini menjadi fenomena yang menarik bagi investor. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami motivasi investor dalam berinvestasi dan bagaimana mereka berperilaku dalam membuat keputusan untuk berinvestasi di badan usaha milik desa.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi. Wawancara dilakukan untuk memahami realitas investasi dari orang-orang yang mengalaminya secara langsung atau orang yang secara langsung berinvestasi pada BUMNag. Informan adalah mereka yang terlibat dan mengalami fenomena langsung yang sedang diselidiki [17]. Informan dalam penelitian tersebut adalah investor yang menyertakan modalnya di BUMNag dan anggota pemerintah desa yang bertugas membahas, menyepakati Rancangan Peraturan Desa, dan mengawasi kinerja Kepala Desa. Analisis data menggunakan pendekatan fenomenologis.

Lokasi penelitian adalah badan usaha milik desa yang didirikan oleh desa "Air Jernih". Desa Air Jernih merupakan salah satu desa di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. BUMDes didirikan pada tahun 2018, berdasarkan kesepakatan musyawarah masyarakat desa. Badan usaha mengelola unit usaha Pertanian dan unit usaha Bank Sampah. Dipimpin oleh seorang direktur dan 12 karyawan. Informan yang terlibat terdiri dari investor, dan mereka termasuk dalam anggota badan musyawarah desa dan masuk ke dalam perangkat pemerintah desa.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kekuatan dan Kebijakan

Minat investor muncul karena adanya keselarasan antara semangat yang ditawarkan oleh direktur badan usaha milik desa dan tokoh-tokoh desa lainnya. Keselarasan dapat menciptakan kerukunan dan menjadi sangat penting bagi investor karena tanpa kerukunan maka akan menghambat jalan pengurus menjalankan lembaga ekonomi desa. Kerukunan ini akan menciptakan keseimbangan yang sangat penting dalam menjalankan lembaga ekonomi desa, dimana lembaga ini merupakan kolaborasi antara pemerintah desa dengan masyarakat.

*"... Bumdes ini walaupun berdasarkan program, tetap harus ada kesesuaian antara yang di atas dan di bawah. Inilah yang menjadi dasar bagi kami di bamus [badan musyawarah] ..."*

Temuan ini mendukung konteks kekuasaan dan kebijakan investasi terhadap badan usaha milik desa memberikan kekuasaan pada investor, yang kemudian dapat berimplikasi pada kebijakan yang dijalankan pada badan tersebut. Sebagai unsur administrasi di Desa "Air Jernih", informan 1 memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menentukan kebijakan desa. Namun, kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa pada badan usaha milik desa tidak dapat dilaksanakan kapan saja. Masyarakat desa membutuhkan pengaruh dari pemimpin desa. Sehingga, investasi yang dilakukan oleh informan 1, dapat memberikan kekuatan dalam menetapkan kebijakan investasi pada masyarakat lain melalui pengaruh dan contoh teladan kepemimpinan. Informan 1, sebagai pemimpin desa, mengatakan bahwa ia terlibat dalam mempengaruhi elemen masyarakat lain untuk memasukkan modal mereka di badan usaha milik desa.

*"...Maksudnya pemegang saham. Yang pasti nanti kami akan ikut melobi bersama-sama..."*

Badan usaha milik desa dapat memanfaatkan potensi desa secara optimal baik dari sisi sumber daya manusia, sumber daya keuangan maupun sumber daya alam, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Pemanfaatan yang optimal diharapkan dapat menciptakan hasil yang dapat digunakan kembali sebagai sumber pendapatan desa dan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Informan 2 juga mengatakan bahwa ia mengundang calon investor baru dan menyebarkanluaskannya. Hal ini ia lakukan karena bangga dengan pencapaian badan usaha milik desa yang telah membawa nama baik Desa "Air Jernih" ke tingkat provinsi, meski masih dalam tahap percontohan. Manfaat memiliki badan usaha milik desa dirasakan langsung oleh masyarakat desa, termasuk informan. Desa memanfaatkan potensi lahan masyarakat yang tidak produktif untuk dikelola menjadi lahan jagung yang lebih menghasilkan. Mekanisme yang dijalankan oleh badan usaha milik desa adalah dengan menyewa lahan yang tidak produktif tersebut. Kegiatan badan usaha milik desa yang memberi manfaat kepada masyarakat ini, disebut menjadi salah satu motivasi informan 2 untuk berinvestasi pada badan usaha milik desa.

Lahan yang tidak produktif telah disewa oleh badan usaha milik desa untuk digunakan sebagai ladang jagung di bawah unit usaha pertanian. Demikian juga unit usaha bank sampah perusahaan telah berkontribusi mengurangi sampah plastik masyarakat dan mengolahnya menjadi produk ekonomi lainnya. Meskipun pengoperasian unit bisnis ini belum menghasilkan manfaat finansial yang signifikan bagi investor, unit-unit bisnis ini telah memberikan manfaat sosial lainnya bagi masyarakat. Kebanggaannya terhadap kinerja badan usaha milik desa terbukti dari kesediaannya membantu organisasi ini mendapatkan tambahan biaya operasional dari investor. Meskipun organisasi ini belum dapat memberikan manfaat finansial, ia menyatakan bahwa itu normal karena organisasi ini masih dapat dimintai pertanggungjawaban atas hal ini secara transparan.

*"... bagi kami demikian juga, selagi masih nampak tujuannya, masih bisa dipertanggungjawabkan, jangankan 200 juta... kapan perlu 400 juta pun akan kami berikan..."*

Singkatnya, badan usaha desa harus memberikan manfaat terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum mereka dapat menerima investasi baru. Meskipun pada tahap awal badan usaha desa hanya mampu memberikan manfaat sosial, sebagaimana karakteristik badan usaha milik desa yang dirancang oleh peraturan pemerintah, hal tersebut dapat menjadi motivasi bagi kelompok investor tertentu.

## 2. Current and future motives

Bagi sebagian pendapat perangkat desa, badan usaha milik desa merupakan jawaban atas banyaknya tenaga kerja yang belum menemukan peluang kerja. Badan usaha ini diharapkan dapat berkembang, dan diikuti dengan semakin banyaknya unit usaha yang dikelolanya. Hal ini juga menjadi salah satu motif investasi bagi Informan. Berdasarkan motif tersebut, Informan menjelaskan kesediaannya untuk berkontribusi dalam pengembangan badan usaha milik desa melalui penyertaan modal.

*"...Yang jelas bagi kami, dengan semakin banyak unit usahanya maka anak – anak kami dapat direkrut..."*

Meskipun saat ini, ia belum menerima pengembalian keuangan atas investasinya, informan menjelaskan bahwa pengorbanan itu tidak bernilai apa pun dibandingkan dengan manfaat jangka panjang yang diharapkannya. Dengan demikian, ia menilai bahwa modal investasi yang telah dibuat tidak dapat disamakan sebagai penyertaan modal.

*"... bagi kami, tentang penyertaan modal, tidak bisa sama dengan penyertaan modal"*

Ada harapan dari investasi yang dilakukan oleh informan. Harapan ini bukan harapan atas pengembalian finansial, melainkan harapan jangka panjang dalam bentuk manfaat sosial untuk keluarga mereka.

## 3. Investment as voting rights and ownership rights over village-owned enterprises

Masa depan Desa "Air Jernih" ada di tangan generasi muda. Harapan inilah yang disadari oleh Informan 2. Ia tidak ingin agar generasi muda desa meninggalkan kampung halamannya. Sebaliknya, ia berharap generasi muda membangun desanya ke depan. Kehadiran badan usaha milik desa yang semakin kuat ke depannya, dengan semakin banyaknya unit usaha yang dikembangkan, bisa menjadi salah satu aspek yang dapat menyerap tenaga kerja pemuda Desa "Air Jernih". Ia juga mengibaratkan badan usaha milik desa ke

depannya sebagai mesin yang dapat berjalan secara sistematis, sehingga dapat bekerja secara otomatis dalam meningkatkan kemakmuran Nagari.

*“... ini seperti mobil, rute dan trayeknya sudah ada, dan sekarang tinggal menunggu penumpang...”*

Investasi yang diberikan kepada badan usaha milik desa telah menjadi simbol kepemilikan Informan 2 untuk mendapatkan haknya. Informan 2 saat ini memiliki saham di BUMDes, sehingga di masa depan ia berharap anak-anaknya dapat diterima untuk bekerja di perusahaan sebagai hadiah atas pengorbanannya saat ini.

*“... jadi, dengan adanya penyertaan kita disana, jumlah unit bisnisnya berkembang, dan semakin banyak anak – anak kita yang direkrut di BUMDes...”*

Dengan kata lain, Informan 2 menyatakan bahwa seolah-olah dia sedang membangun, atau menegakkan sebuah bangunan. Harapannya, ke depan bangunan tersebut bisa dinikmati oleh anak-anaknya.

#### **4. Manfaat sosial dan manfaat individu sebagai realitas investasi pada badan usaha milik desa**

Sebagai anggota komunitas Desa "Air Jernih", Informan 1 juga merasakan manfaat sosial yang diperoleh dari badan usaha milik desa. Dia menjelaskan, perusahaan telah menggunakan lahan yang tidak produktif sebagai ladang jagung. Ia juga menceritakan bahwa sebagai anggota bank sampah, ia merasa limbah rumah tangga yang dihasilkannya dapat dimanfaatkan oleh badan usaha milik desa untuk diolah menjadi produk yang lebih bermanfaat. Oleh karena itu, meski belum mendapat kepastian mengenai pengembalian finansial atas investasinya, ia sangat yakin dengan kinerja pengelolaan badan usaha milik desa dan unit usaha yang saat ini ia pimpin. Informan 1 sangat optimis bahwa perusahaan milik Desa "Air Jernih" akan berkembang. Oleh karena itu, ia tidak pernah mempertanyakan pengembalian investasi karena sangat percaya dengan figur direktur saat ini.

*“... misalnya diberikan satu juta, dan kembali dua juta. Nah, tidak pernah kami berpikir sampai kesitu... tidak pernah kami berpikir bahwa dalam penyertaan modal ini kami akan berlabu. Hanya manfaat sosial itu tadi yang kami cari...”*

Penjelasan tentang rencana jangka panjang badan usaha milik desa juga menjadi alasan lain keputusan investasi Informan 2. Ia menjadi sadar akan gambaran potensi dan manfaat yang akan dinikmati oleh masyarakat Desa "Air Jernih" ke depannya. Informan 2 menyiratkan bahwa ia setuju dengan gambaran masa depan yang dijelaskan oleh direktur.

*“...yang jelas dengan adanya badan usaha desa, dan semakin kuat nantinya, bisa merekrut banyak tenaga kerja... dari sosial benefit tadi, itu yang kami harapannyo...”*

Investasi sosial sering digunakan sebagai strategi untuk menangani masalah sosial seperti ekonomi dan pengangguran melalui layanan publik [18]. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan generasi mendatang dengan memberikan bekal sehingga dapat menghadapi risiko sosial di masa depan [19]. Seperti kebijakan pembentukan badan usaha milik desa yang dilakukan pemerintah desa. Badan usaha milik desa diharapkan dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Disamping itu, badan usaha ini berbeda dari perusahaan nirlaba [20]. Badan usaha ini memiliki tujuan untuk memberikan manfaat finansial dan manfaat sosial, dimana manfaat sosial lebih besar daripada manfaat finansial, terutama pada masa – masa awal pendiriannya. Jadi bagi investor rasional, jenis investasi ini kurang menarik. Badan usaha milik desa yang diharapkan menjadi salah satu pilar pembangunan nasional yang didirikan untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat desa.

Namun, badan usaha ini tidak bisa beroperasi dengan baik jika hanya mengandalkan dana dari pemerintah desa. Oleh karena itu, badan usaha desa membutuhkan investasi dan komitmen dari masyarakat desa [21] untuk mendukung modal operasional. Dengan kata lain, ada logika yang saling berkontradiksi antara rasionalitas investor dan tujuan pendirian badan usaha desa [22]. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki perilaku investor yang telah menginvestasikan uangnya di badan usaha milik desa.

Badan usaha ini tidak bisa berjalan sendiri jika hanya mengandalkan dana dari pemerintah desa. Meskipun organisasi ini berfokus pada investasi dalam memaksimalkan lapangan kerja dan meningkatkan layanan publik, pemerintah tidak boleh terlalu ambisius dalam menerapkan strategi investasi sosial untuk meningkatkan kebijakan sosial [23]. Strategi investasi sosial tersebut bertujuan untuk mencapai kelanjutan

kesejahteraan sosial [24]. Strategi penyesuaian kesejahteraan ini dilakukan dengan mengubah pengelolaan aset desa yang berbasis kapitalisme menjadi kesejahteraan sosial yang produktif. Oleh karena itu, badan usaha ini membutuhkan investasi dari masyarakat untuk memenuhi modal operasionalnya. Kebijakan pemerintah desa untuk berinvestasi di perusahaan ini sangat positif pada langkah pertama [25]. Tidak hanya dari pemerintah desa, investasi dari anggota masyarakat desa lainnya juga sangat penting untuk kemajuan perusahaan.

Pemerintah desa menggunakan kekuasaannya mengundang calon investor baru dan menyebarluaskan hal ini. Dari konteks kekuasaan, kebijakan adalah hasil dari perpaduan kompleksitas kepentingan yang saling bertemu dan bersesuaian [26]. Sementara itu, dari perspektif kebijakan, dukungan pemerintah terhadap badan usaha milik desa dikenal sebagai rasional kognitif dan normatif yang khas. Kognitif umum pembuat kebijakan adalah untuk mempublikasikan pemahaman mereka tentang isu-isu sosial, membuat dan mengawasi perumusan kebijakan dalam berbagai kebijakan sosial yang saling terkait satu sama lain [27].

Oleh karena itu, minat pemerintah untuk mendukung kelancaran badan usaha milik desa adalah ikut serta memberikan tambahan sumber dana sebagai investor, serta mengajak tokoh masyarakat lainnya untuk berpartisipasi. Di bawah kekuasaan dan sudut pandang politik, investasi sosial mendorong kesediaan tokoh masyarakat untuk mengorbankan konsumsi saat ini untuk merealokasi sumber daya ke program-program yang hasilnya diharapkan dapat membuat kehidupan masyarakat lebih baik di masa depan [28]. Dengan kata lain, aspek kekuasaan dan kebijakan menjadi alasan utama investor dalam berinvestasi di badan usaha milik desa. Sikap sosial dan daya tarik politik [29] investor adalah penampilan subjektif langsung yang mencerminkan motif psikologis.

Badan usaha milik desa yang saat ini sedang diinisiasi merupakan jawaban atas banyaknya pekerja yang belum menemukan pekerjaan. Harapannya, badan usaha milik desa dapat berkembang, diikuti dengan semakin banyaknya unit usaha yang mereka kelola, telah menjadi salah satu motif investasi. Karakteristik investasi sosial terletak pada inovasi [30], dalam hal norma logika dan kelembagaan, dan juga pengembalian dan tujuan investasi. Dalam konteks investasi konvensional, kedua dimensi ini dapat bekerja secara harmonis. Namun, dalam konteks investasi sosial, kedua dimensi ini bertentangan satu sama lain [31]. Meski begitu, investasi yang diberikan kepada badan usaha milik desa tetap menjadi simbol kepemilikan investor untuk mendapatkan haknya di masa depan. Jika saat ini, organisasi masih fokus pada manfaat sosial, dan ketika organisasi telah berkembang di masa depan, investor memiliki hak untuk berbagi dalam keuntungan mereka.

Realitas investasi di badan usaha milik desa dapat dikelompokkan sebagai manfaat sosial dan manfaat individu. Masyarakat menikmati manfaat sosial pada tahap pertama pendiriannya. Badan usaha milik desa dapat memanfaatkan potensi desa secara optimal, seperti lahan yang tidak terpakai milik warga, serta sampah rumah tangga yang telah merusak lingkungan. Meskipun saat ini belum ada manfaat finansial, penggunaan lahan menganggur sebagai ladang jagung dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi buruh tani. Demikian juga unit usaha bank sampah dapat mengurangi persoalan lingkungan dari sampah rumah tangga. Meskipun tujuan investasi sosial dapat bervariasi, kebijakan untuk mengembangkan badan usaha milik desa tetap konsisten [32]. Ini menyiratkan bahwa investor masih mengharapkan manfaat individu yang dapat diperoleh dari investasi mereka di masa depan. Diharapkan pengembangan unit usaha dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami motivasi investor dalam berinvestasi dan bagaimana mereka berperilaku dalam membuat keputusan untuk berinvestasi di perusahaan milik desa. Badan usaha milik desa sebagai usaha rintisan tidak dapat berjalan secara mandiri jika hanya mengandalkan dana dari pemerintah desa. Oleh karena itu, badan usaha milik desa membutuhkan investasi dari masyarakat untuk memenuhi modal operasional. Sementara itu, investor melihat badan usaha milik desa sebagai investasi berisiko tinggi. Kontradiksi antara kebutuhan BUMDes (BUMNag) akan investor dengan investasi pada BUMNag yang kurang menarik dalam sudut pandang investor, maka hal ini menjadi fenomena yang menarik bagi investor.

Temuan penelitian tersebut adalah bahwa investasi pribadi yang dilakukan oleh investor dari pemerintah desa dilatarbelakangi oleh alasan kekuasaan dan kebijakan. Pemerintah desa menggunakan kekuasaannya mengundang calon investor baru dan menyebarluaskan hal ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah motivasi investasi didorong oleh manfaat sosial dan manfaat individu. Manfaat sosial ditemukan dari beberapa kegiatan perusahaan yang dapat mengurangi permasalahan sosial di masyarakat. Dampak dari penelitian ini adalah mengurangi lahan yang tidak produktif dan masalah kerusakan lingkungan.

Realitas investasi di badan usaha milik desa dapat dikelompokkan sebagai manfaat sosial dan manfaat individu. Masyarakat menikmati manfaat sosial pada tahap pertama pendiriannya. Badan usaha milik desa dapat memanfaatkan potensi desa secara optimal. Meskipun tujuan investasi sosial dapat bervariasi, kebijakan untuk mengembangkan badan usaha milik desa tetap konsisten. Ini mengimplikasikan bahwa investor masih mengharapkan manfaat individu yang dapat diperoleh dari investasi mereka di masa depan. Diharapkan pengembangan unit usaha dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Apostolopoulos, R. Newbery, and M. Gkartzios, "Social enterprise and community resilience: Examining a Greek response to turbulent times," *J. Rural Stud.*, vol. 70, no. June 2017, pp. 215–224, 2019, doi: 10.1016/j.jrurstud.2018.03.017.
- [2] Y. Y. Kim and Y. J. Choi, "Does social protection crowd out social investment?," *Policy Soc.*, vol. 39, no. 2, pp. 208–225, 2020, doi: 10.1080/14494035.2019.1677377.
- [3] A. Steiner and S. Teasdale, "Unlocking the potential of rural social enterprise," *J. Rural Stud.*, vol. 70, no. May, pp. 144–154, 2019, doi: 10.1016/j.jrurstud.2017.12.021.
- [4] J. Ge, H. Xu, and M. M. Pellegrini, "The effect of value co-creation on social enterprise growth: Moderating mechanism of environment dynamics," *Sustain.*, vol. 11, no. 1, 2019, doi: 10.3390/su11010250.
- [5] J. Hillman, S. Axon, and J. Morrissey, "Social enterprise as a potential niche innovation breakout for low carbon transition," *Energy Policy*, vol. 117, no. February, pp. 445–456, 2018, doi: 10.1016/j.enpol.2018.03.038.
- [6] N. Ketprapakorn and S. Kantabutra, "Sustainable social enterprise model: Relationships and consequences," *Sustain.*, vol. 11, no. 14, pp. 1–39, 2019, doi: 10.3390/su11143772.
- [7] Y. Chandra, "Social entrepreneurship as emancipatory work," *J. Bus. Ventur.*, vol. 32, no. 6, pp. 657–673, 2017, doi: 10.1016/j.jbusvent.2017.08.004.
- [8] B. Luke and V. Chu, "Social enterprise versus social entrepreneurship: An examination of the 'why' and 'how' in pursuing social change," *Int. Small Bus. J.*, vol. 31, no. 7, pp. 764–784, 2013, doi: 10.1177/0266242612462598.
- [9] E. A. R. Fowler, B. S. Coffey, and H. R. Dixon-Fowler, "Transforming Good Intentions into Social Impact: A Case on the Creation and Evolution of a Social Enterprise," *J. Bus. Ethics*, vol. 159, no. 3, pp. 665–678, 2019, doi: 10.1007/s10551-017-3754-5.
- [10] W. Phillips, H. Lee, A. Ghobadian, N. O'Regan, and P. James, "Social Innovation and Social Entrepreneurship: A Systematic Review," *Gr. Organ. Manag.*, vol. 40, no. 3, pp. 428–461, 2015, doi: 10.1177/1059601114560063.
- [11] K. Chatzitheodorou, A. Skouloudis, K. Evangelinos, and I. Nikolaou, "Exploring socially responsible investment perspectives: A literature mapping and an investor classification," *Sustain. Prod. Consum.*, vol. 19, pp. 117–129, Jul. 2019, doi: 10.1016/j.spc.2019.03.006.
- [12] V. Pestoff and L. Hulgård, "Participatory Governance in Social Enterprise," *Voluntas*, vol. 27, no. 4, pp. 1742–1759, 2016, doi: 10.1007/s11266-015-9662-3.
- [13] B. Badaruddin, K. Kariono, E. Ermansyah, and L. Sudarwati, "Village community empowerment through village owned enterprise based on social capital in North Sumatera," *Asia Pacific J. Soc. Work Dev.*, no. May, 2020, doi: 10.1080/02185385.2020.1765855.
- [14] F. Lyon and R. Owen, "Financing social enterprises and the demand for social investment," *Strateg. Chang.*, vol. 28, no. 1, pp. 47–57, Jan. 2019, doi: 10.1002/jsc.2245.
- [15] U. M. I. Hidayati, "Performance Analysis of Village-Owned Enterprise Managers as a Basic of Designing Education and Training," *Eur. J. Bus. Manag.*, vol. 7, no. 32, pp. 143–147, 2015.
- [16] D. Benders, "Approach to effective practice strategies in music," *Sport Art*, vol. 1, no. 2, pp. 46–48, 2013, doi: 10.13189/saj.2013.010204.
- [17] B. Barbosa and I. Fonseca, "A phenomenological approach to the collaborative consumer," *J. Consum. Mark.*, vol. 36, no. 6, pp. 705–714, 2019, doi: 10.1108/JCM-11-2017-2468.
- [18] S. Sinclair, M. Mazzei, S. Baglioni, and M. J. Roy, "Social innovation, social enterprise, and local public services: Undertaking transformation?," *Soc. Policy Adm.*, vol. 52, no. 7, pp. 1317–1331, 2018, doi: 10.1111/spol.12389.
- [19] L. Andersson, "Operationalising social investment: from policy dimensions to ideal-types," *J. Int. Comp. Soc. Policy*, vol. 34, no. 2, pp. 109–125, 2018, doi: 10.1080/21699763.2018.1465446.

- [20] D. R. Young and J. D. Lecy, "Defining the Universe of Social Enterprise: Competing Metaphors," *Voluntas*, vol. 25, no. 5, pp. 1307–1332, 2014, doi: 10.1007/s11266-013-9396-z.
- [21] M. Bull and R. Ridley-Duff, "Towards an Appreciation of Ethics in Social Enterprise Business Models," *J. Bus. Ethics*, vol. 159, no. 3, pp. 619–634, 2019, doi: 10.1007/s10551-018-3794-5.
- [22] I. A. Davies, H. Haugh, and L. Chambers, "Barriers to Social Enterprise Growth," *J. Small Bus. Manag.*, vol. 57, no. 4, pp. 1616–1636, 2019, doi: 10.1111/jsbm.12429.
- [23] B. Cantillon and W. Van Lancker, "Three Shortcomings of the Social Investment Perspective," *Soc. Policy Soc.*, vol. 12, no. 4, pp. 553–564, Oct. 2013, doi: 10.1017/S1474746413000080.
- [24] A. Chan, S. Ryan, and J. Quarter, "Supported Social Enterprise: A Modified Social Welfare Organization," *Nonprofit Volunt. Sect. Q.*, vol. 46, no. 2, pp. 261–279, 2017, doi: 10.1177/0899764016655620.
- [25] L. Sepulveda, "Social Enterprise - A New Phenomenon in the Field of Economic and Social Welfare?," *Soc. Policy Adm.*, vol. 49, no. 7, pp. 842–861, 2015, doi: 10.1111/spol.12106.
- [26] S. Häusermann, "The multidimensional politics of social investment in conservative welfare regimes: family policy reform between social transfers and social investment," *J. Eur. Public Policy*, vol. 25, no. 6, pp. 862–877, Jun. 2018, doi: 10.1080/13501763.2017.1401106.
- [27] A. Hemerijck, "Social investment as a policy paradigm," *J. Eur. Public Policy*, vol. 25, no. 6, pp. 810–827, 2018, doi: 10.1080/13501763.2017.1401111.
- [28] A. Hemerijck, "The Quiet Paradigm Revolution of Social Investment," *Soc. Polit. Int. Stud. Gender, State Soc.*, vol. 22, no. 2, pp. 242–256, Jun. 2015, doi: 10.1093/sp/jxv009.
- [29] S. Shengfang and W. Mina, "National Social Attitudes and Political Appeals in the Process of Rising of Competitive Sports in China," *Int. J. Hum. Mov. Sport. Sci.*, vol. 4, no. 3, pp. 45–49, 2016, doi: 10.13189/saj.2016.040303.
- [30] A. Picciotti, "Towards Sustainability: the Innovation Paths of Social Enterprise," *Ann. Public Coop. Econ.*, vol. 88, no. 2, pp. 233–256, 2017, doi: 10.1111/apce.12168.
- [31] A. Nicholls, "The institutionalization of social investment: The interplay of investment logics and investor rationalities," *J. Soc. Entrep.*, vol. 1, no. 1, pp. 70–100, 2010, doi: 10.1080/19420671003701257.
- [32] A. Nicholls and S. Teasdale, "Dynamic persistence in UK policy making: the evolution of social investment ideas and policy instruments," *Public Manag. Rev.*, vol. 9037, 2019, doi: 10.1080/14719037.2019.1699948.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini sepenuhnya didanai oleh Politeknik Negeri Padang, tahu anggaran 2020.